

EVALUASI HASIL PROGRAM BIMBINGAN SOSIAL DAN KETERAMPILAN BAGI BEKAS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BWBP) OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER

(Evaluation Mentoring Program Of Social and Skills For Former Prisoners By Social Service District Jember)

Ilham Fratama Ahmad, Anwar, M. Hadi Makmur
Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail: DPU@unej.ac.id

Abstrak

Peningkatan kesejahteraan masyarakat terus digalakkan oleh pemerintah khususnya masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Jenis PMKS yang mungkin sangat minim isu dalam masyarakat adalah Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP) atau sering disebut mantan narapidana karena mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali kedalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal. Kebijakan yang diambil adalah dibentuknya suatu program yang dinamakan Program Bimbingan Sosial Dan Keterampilan Bagi Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP). Program tersebut dilaksanakan pada tahun 2010 dengan tujuan untuk membimbing peserta agar dapat merubah cara berpikir, bersikap dan bertingkah laku yang merugikan masa depannya kearah berpikir positif sekaligus memberikan bekal keterampilan dengan harapan mereka tidak lagi melakukan perbuatan kriminal yang melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah keingintahuan akan bagaimana Evaluasi Hasil Program Bimbingan Sosial dan Keterampilan Bagi Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP) Oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Jember. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*, sedangkan untuk menganalisa data mempergunakan teknik Miles dan Hubermann. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan kurang tepat sasaran, karena tidak sesuai dengan bakat dan minat BWBP. Walaupun bimbingan sosial yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi kehidupan BWBP. Saran dalam penelitian ini adalah bimbingan sosial dan mental sebaiknya dilakukan secara *bottom up*, bimbingan keterampilan dan bantuan seharusnya sesuai dengan minat BWBP, dan seharusnya dilakukan monitoring dan pendampingan.

Kata kunci: Evaluasi, Program, BWBP, Dinas Sosial

Abstract

Improving the welfare of society continue to be encouraged by the government especially the people with social welfare issues (PMKS) . PMKS types that may be very minimal issues in the community are former inmates of Corrections (BWBP) or often referred to as ex- inmates have problems to adjust back into civilian life , so find it difficult to get a job or carry out a normal life . Measures taken is the establishment of a program called Social And Skills Tutoring Program For Former correctional inmates (BWBP) . The program was implemented in 2010 with the aim to guide participants in order to change the way of thinking, acting and behaving adverse future direction of positive thinking skills as well as provide skills in the hope they are no longer a criminal act that violates prevailing norms in society . Formulation of the problem in this research is the curiosity of how the Evaluation Program Guidance and Social Skills Used For correctional inmates (BWBP) By Social Service Jember . This research conducted in the Department of Social Jember . Determination of the informants in this study used purposive sampling , while using techniques to analyze the data and Hubermann Miles . The results showed that the counseling skills and less well-targeted aid , because it is not according to their talents and interests BWBP . Although social guidance given is really useful for life BWBP . Suggestions in this study is the social and mental health counseling should be done in a bottom -up , counseling skills and assistance should be in accordance with the interests BWBP , and should be monitored and assistance .

Keywords: : Evaluation, Program, BWBP, Social Service

Pendahuluan

Pada hakekatnya pembangunan sosial di Indonesia merupakan upaya untuk merealisasikan cita-cita luhur kemerdekaan, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemenuhan taraf kesejahteraan sosial perlu terus diupayakan mengingat sebagian besar rakyat Indonesia masih belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diinginkan atau biasa disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Jenis PMKS yang mungkin sangat minim isu dalam masyarakat adalah Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP) atau sering disebut mantan narapidana karena mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali kedalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Meningkatnya jumlah BWBP setiap tahun di Kabupaten Jember akhirnya memerlukan adanya perhatian khusus untuk memberikan kekuatan kepada mantan narapidana agar mampu beradaptasi dalam masyarakat serta tidak mengulangi lagi tindakan kriminal ataupun tindakan yang melanggar hukum ataupun norma sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini pemerintah yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengonsolidasikan dan memberdayakan mantan narapidana, dan kebijakan yang diambil adalah dibentuknya suatu program yang dinamakan Program Bimbingan Sosial dan Keterampilan Bagi Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember pada tahun 2010 dengan tujuan untuk membimbing mantan narapidana agar dapat merubah cara berpikir, bersikap dan bertindak laku yang merugikan masa depannya kearah yang berpiki positif dan normatif sekaligus memberikan bekal keterampilan dengan harapan mereka tidak lagi melakukan perbuatan kriminal yang melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat (pedoman kegiatan 2010:4).

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti untuk daerah Provinsi Jawa Timur, mulai bulan mei tahun 2010 Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-Jawa Timur melaksanakan kegiatan Bimbingan Sosial dan Keterampilan terhadap BWBP. Program ini pertama kali dilaksanakan di Kota Malang dan Kabupaten Jember karena kedua kabupaten/kota tersebut sebagai tolak ukur untuk menjalankan program ini dengan peserta sebanyak 30 orang yang sudah terseleksi sesuai bakat dan minatnya. Jumlah BWBP yang mengikuti program ini di Kota Malang sebanyak 15 orang BWBP dan di Kabupaten Jember sebanyak 15 orang BWBP.

Beberapa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan pedoman kegiatan adalah 1).Seleksi 2).Bimbingan Sosial dan latihan keterampilan, 3). Bantuan Usaha Ekonomi Secara Produktif dan 4). Monitoring dan Pendampingan. Keseluruhan proses ini dilakukan selama kurang lebih 15 hari, mungkin dalam

tatanan normative kegiatan ini cukup singkat dalam membentuk dan merubah perilaku seseorang. Walaupun demikian kegiatan ini haruslah di junjung tinggi, sebab ini merupakan itikad baik pemerintah untuk menolong mantan narapidana untuk bisa beradaptasi dan mendapatkan kepercayaan kembali dalam masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih layak.

Peran Dinas Sosial Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program ini fungsinya adalah sebagai pelaksana dari kegiatan/program ini. Begitu juga dengan peran dari Dinas Sosial Kabupaten Jember. Dinas Sosial Kabupaten Jember sebagai pelaksana dari program tersebut. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember no. 17 tahun 2005 BAB II pasal 3 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi yang isinya bahwa Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah yang meliputi kesejahteraan sosial, reabilitasi sosial, dan penyelenggaraan bantuan sosial.

Melihat kenyataan yang terjadi dilapangan sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Proses pendampingan program ini kurang maksimal, artinya pihak yang terkait untuk memonitoring kegiatan dimasyarakat kurang berjalan dengan baik, hal ini terlihat adanya proses pelepasan oleh pihak yang berwenang tanpa adanya pendampingan yang secara berkesinambungan. Selain itu tidak adanya mekanisme pendampingan dalam pedoman kegiatan, sehingga proses monitoring hanya dilakukan oleh pemerintah desa /kelurahan setempat, selain itu juga masalah keterampilan yang diberikan dipukul rata tanpa melihat talenta/ kemampuan klien yaitu semua diberikan peralatan bengkel.

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi program kegiatan bimbingan sosial dan ketrampilan bagi Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP) oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember?.

Metode Penelitian

Sesuai dengan judul dan rumusan masalah dalam penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Menurut Moleong (2006:6) Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu kebutuhan. Tipe penelitian deskriptif menurut Narbuko dan Acmadi (2003:44) yaitu, "penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikan."

Dari penjelasan diatas dalam paradigma penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dapat disimpulkan adalah sebuah penelitian yang mengemukakan fakta sesuai

dengan keadaan lapangan tentang suatu objek, akibat, gejala maupun kondisi atau keadaan dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan secara detail kedalam suatu bentuk catatan atau tulisan secara sistematis.

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan lokasi penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Jember. Alasannya karena Dinas Sosial sebagai pelaksana kegiatan bimbingan sosial dan ketrampilan bagi Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan dan adanya keterbatasan waktu dan dana sehingga penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan teknik purposive dalam pengambilan informan, yaitu dengan cara penunjukan secara langsung informan yang dipilih oleh peneliti yang bersandar kepada kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, adapun kriteria penentuan informan primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Staf pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Jember
2. Ikut secara langsung kegiatan bimbingan sosial dan pelatihan di kabupaten jember
3. Staf pegawai Dinas Sosial yang mengerti tentang kegiatan bimbingan sosial BWBP di kabupaten Jember.

Kriteria di atas merupakan rujukan peneliti dalam menentukan informan primer dan diharapkan kriteria tersebut mampu mendapatkan informan primer yang memberikan informasi sesuai dengan data yang diharapkan oleh peneliti. Maka informan primer dalam penelitian adalah sebagai berikut, Ibu Sri Wahyuni yang merupakan ketua kegiatan dalam pelaksanaan bimbingan sosial dan keterampilan BWBP di daerah Jember. Selanjutnya Moh. Ridwan yang merupakan wakil ketua pelaksanaan kegiatan bimbingan sosial dan pelatihan bagi BWBP di daerah Jember dan kemudian Informan selanjutnya adalah Bapak Samsuddin yang merupakan sub perencanaan di dalam Dinas Sosial di Kabupaten Jember.

Penggalan informasi tentunya tidak cukup jika hanya bersifat searah. Artinya hanya mendapatkan informasi dari pihak pelaksana kebijakan, maka untuk menguatkan informasi tentunya membutuhkan adanya data pembanding dan pengontrol kebenaran data. Agar data yang didapatkan benar-benar valid dan mampu dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Maka peneliti juga menggunakan jasa informan tambahan, penentuan informan tambahan ini juga menggunakan teknik purposive/ penunjukan secara langsung dengan berpatokan kepada kriteria yang sudah dibuat oleh peneliti, kriteria informan tambahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Seorang BWBP yang menerima bantuan dan tinggal di Kabupaten Jember Minimal 5 tahun
2. Sudah berumur minimal 17 tahun
3. Mengerti dan tahu tentang kegiatan bimbingan sosial dan pelatihan bagi BWBP yang dilakukan oleh Dinas Sosial.

Sesuai dengan kriteria tersebut maka informan tambahan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Ade Haryanto, Bambang Sutrisno, Edi Susanto, Slamet Riyadi, Nanang Kosim. Informan tambahan yang terakhir adalah Totok hariyanto yang merupakan salah satu aparat pemerintah Desa Ledokombo dengan usia 38 tahun dan

mengetahui tentang kegiatan yang dilakukan oleh dinas sosial dalam mengembangkan BWBP.

Urain di atas merupakan informan yang memberikan jasa informasi dalam penelitian ini. Dengan harapan bahwa informasi yang disampaikan kepada peneliti benar-benar valid dan teruji ke absahannya. Informan dalam penelitian ini baik informan primer maupun skunder berjumlah 8 orang. Di hentikannya proses penggalan data oleh peneliti dikarenakan adanya kejenuhan data atau informasi yang diperoleh oleh peneliti terhadap persoalan evaluasi kegiatan bimbingan sosial dan pelatihan yang diadakan di Kabupaten Jember terhadap seorang BWBP.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer menggunakan teknik wawancara dan observasi partisipatif.
2. Data Skunder yang digunakan adalah dokumentasi berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya.

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif. Analisis interaktif merupakan suatu model analisis data kualitatif yang dibuat oleh Miles dan Huberman dan untuk teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi. Menurut Moleong (2006:330) menyatakan bahwa "triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, peneliti menemukan beberapa tahapan proses pelaksanaan Program Bimbingan Sosial dan Keterampilan Bagi Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan.

1. Seleksi

Sesuai dengan pedoman pelaksanaan program (03:2010) ada beberapa kriteria yang bisa mendapatkan program ini antara lain: Pernah menjalani pembinaan di rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan, Berusia produktif, Merupakan masyarakat tidak mampu (diutamakan yang belum punya usaha rutin), Mempunyai minat/ niat untuk mengikuti bimbingan sosial dan keterampilan dan mengetahui jenis keterampilan yang di minati.

Seleksi yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial tentunya berdasarkan data BWBP pada tahun 2010 yang diperoleh dari lapas Jember, sehingga dengan mudah pihak pelaksana program untuk memilah siapa-siapa yang mendapatkan program tersebut.

Pihak Dinas Sosial dalam melakukan investigasinya ternyata tidak langsung datang menemui orangnya ataupun melalui aparat kelurahan / desa untuk meminta informasi tentang BWBP di daerah tersebut. Jadi ke 15 anggota tersebut di investigasi secara diam-diam oleh pihak Dinas Sosial, namun yang pasti sesuai dengan pengakuan yang diberikan oleh bapak Bambang tidak mengetahui secara langsung investigasi tersebut, malahan tidak ada informasi sebelumnya kalau akan ada program tersebut kepada BWBP.

2. Bimbingan Sosial Dan Keterampilan

Mekanisme bimbingan yang diberikan dengan sistem ceramah dan tanya jawab merupakan bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam merubah pola pikir dan perilaku. Mungkin secara sepintas apa yang telah dijelaskan dalam pedoman pelaksanaan hal ini sangat dibenarkan karena mekanisme kegiatan bimbingan dengan sistem ceramah dan tanya jawab. Hal ini akan bertolak belakang dengan mekanisme pengembangan masyarakat, dimana mekanisme yang dilakukan harus bersifat bottom up yaitu mencari sendiri kesalahan atau masalah yang dihadapi oleh BWBP dengan berbagai mekanisme yang dilakukan dapat dicontohkan dengan kegiatan rembuk untuk merumuskan masalah yang dihadapi baru setelah di pecahkan dalam bentuk diskusi antar kelompok.

Bimbingan ketrampilan tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku, dimana pedoman ini mengharuskan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh BWBP. Pihak pelaksana hanya menyediakan peralatan bengkel sehingga semua kegiatan keterampilan hanya sebatas itu saja tanpa harus melihat kemampuan BWBP yang ikut dalam kegiatan tersebut. Seharusnya pihak pelaksana menyediakan semua peralatan yang sesuai dengan keahlian BWBP yang menjadi anggota kegiatan tersebut, bukan memukul rata semua harus bisa menjadi tukang bengkel dan hal ini sudah menyalahi dari isi kebijakan yang dikeluarkan yang digambarkan dalam bentuk pedoman pelaksanaan kegiatan.

3. Bantuan Usaha Ekonomi Secara Produktif

Bertolak kepada pelaksanaan bimbingan social dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas social Kabupaten Jember Sudah dilaksanakan dengan baik sampai pada tahapan pemberian bantuan sesuai dengan amanat isi kebijakan tersebut. Namun dalam beberapa kegiatan yang dilakukan sebagian kurang maksimal dilaksanakan sehingga tidak menghasilkan out put yang baik, seperti halnya bantuan yang diberikan tidak terlalu menunjang kebutuhan para BWBP dalam memenuhi kebutuhan sendiri maupun keluarganya. Kurang tepatnya bantuan yang diberikan karena tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh penerima kebijakan, seandainya dinas social tidak memukul rata bantuan yang diberikan tetapi disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki penerima bantuan, mungkin kebijakan ini akan lebih menghasilkan out put yang lebih baik lagi.

4. Monitoring dan Pendampingan

Monitoring seharusnya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang peduli terhadap BWBP, tetapi itu tidak terlaksana atau tidak berjalan sesuai dengan pedoman kegiatan yang dilakukan. Secara tidak langsung kegiatan monitoring dan pendamping tidak terlaksana dengan baik, sehingga perkembangan BWBP tidak dapat terukur secara jelas. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengawasan secara langsung oleh dinas social.

Selanjutnya evaluasi hasil Program Bimbingan Sosial dan Keterampilan Bagi Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan.

1. Adequacy

Penilaian ini di tujukan untuk melihat sejauh mana pencapain kegiatan dalam memecahkan masalah. Dan hasilnya kegiatan pelatihan yang diberikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap peserta yang ikut

dalam kegiatan, selain itu bantuan yang diberikannyapun harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, agar kemampuan yang ada mampu di manfaatkan secara maksimal oleh peserta bimbingan dan pelatihan yang ada. bantuan yang diberikan malah tidak difungsikan secara maksimal oleh penerima bantuan, hal ini menggambarkan bahwa ketepatan kegiatan yang dilakukan belum bersifat maksimal dalam memecahkan masalah mantan narapidana yang sudah mendapatkan pelatihan.

2. Equity

Pemerataan yang dimaksud dalam kebijakan tentunya di ukur dari obyek yang di tuju dalam kebijakan tersebut. Langkah pelaksana kebijakan menyesuaikan dengan isi kebijakan, alasan kenapa hanya dalam jumlah atau skal kecil, sesuai dengan yang dijelaskan informan di atas, bahwa program bimbingan sosial dan keterampilan ini merupakan kegiatan percobaan yang dilakukan di dua daerah yaitu daerah Malang dan Jember.

3. Responsivness

Indikator ini untuk menjawab seberapa besar program kegiatan ini membantu masyarakat, kelompok dan seseorang. Hasilnya bimbingan yang diberikan memang telah memberikan suatu masukan yang cukup bagus bagi kelangsungan hidup mantan narapidana dalam masyarakat. Dimana kajian yang diberikan baik menurut agama, hukum dan sosial kemasyarakat benar-benar dirasakan peserta kegiatan, tetapi sebagian yang lain tentang keterampilan yang diberikan serta bantuan tersebut kurang begitu dirasakan oleh peserta kegiatan. Hal ini dikarenakan, keterampilan yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta kegiatan, sehingga keterampilan tersebut tidak mampu diaplikasi dengan baik ketika terjun kedalam masyarakat, begitupun tentang bantuan alat-alat bengkel yang diberikan juga kurang begitu bermanfaat bagi peserta karena memang kurang bermanfaat.

4. Appropriatness

Ketepatan gunaan suatu program kegiatan dalam kebijakan tentunya harus benar-benar di perhatikan dengan baik agar semua yang diberikan dalam kegiatan tersebut mampu di manfaatkan oleh obyek kegiatan tersebut. Hasilnya Menurut kreteria bimbingan dalam pedoman, bahwa keterampilan yang diberikan harus sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh peserta. Sesuai dengan pernyataan informasn sebelumnya bahwa kegiatan keterampilan yang diberikan di pukul rata yaitu keterampilan bengkel, sesungguhnya mengacu kreteria yang ada di pedoman hal ini tidak dibenarkan dan dianggap kurang tepat. Hal inilah yang akhirnya bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan kepada mantan narapidana tidak tepat guna.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang dilakukan dan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. proses pelaksanaan program kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan
 - a. proses seleksi Peserta program bimbingan sosial dan keterampilan BWBP dilakukan oleh pihak Dinas Sosial secara diam-diam tanpa sepengetahuan BWBP itu sendiri

b. bimbingan sosial dan mental dilakukan dengan metode ceramah oleh pihak-pihak yang mengerti permasalahan BWBP

c. bimbingan keterampilan yang diberikan hanya keterampilan perbengkelan

d. bantuan yang diberikan dipukul rata yaitu peralatan bengkel

e. tidak ada monitoring dan pendampingan oleh pihak dinas sosial kabupaten jember setelah proses kegiatan selesai.

2. evaluasi hasil program bimbingan sosial dan keterampilan

a. Adequacy, ketepatan kegiatan yang dilakukan belum bersifat maksimal dalam memecahkan masalah mantan narapidana yang sudah mendapatkan pelatihan.

b. Equity, peserta kegiatan hanya 15 BWBP karena program ini merupakan program percobaan yang dilakukan oleh dinas sosial jawa timur di kabupaten jember dan kabupaten malang

c. Responsivness, kajian agama, hukum dan sosial masyarakat benar-benar dirasakan peserta kegiatan, tetapi sebagian yang lain tentang keterampilan yang diberikan serta bantuan tersebut kurang begitu dirasakan oleh peserta kegiatan

d. Appropriateness, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan kepada mantan narapidana tidak tepat guna.

Saran

Ada beberapa hal yang mungkin perlu di perhatikan dalam menjalankan Program Bimbingan Sosial dan keterampilan bagi BWBP ini yaitu:

1. Bimbingan Sosial dan Mental sebaiknya dilakukan secara *bottom up* agar mengerti masalah yang dihadapi masing-masing BWBP.

2. Bimbingan keterampilan dan bantuan seharusnya sesuai dengan minat dan bakat agar bisa bermanfaat bagi BWBP.

3. Monitoring dan pendampingan seharusnya dilakukan oleh pihak dinas sosial agar mengerti perkembangan BWBP setelah selesai proses kegiatan.

Ibu Dra. Inti Wasiati, MM, selaku dosen pembimbing akademik yang turut memberikan dukungan, arahan, dan nasehat selama penulis menjadi mahasiswa;

Bapak Drs. Sutomo, M.Si, selaku ketua penguji yang telah bersedia untuk menyempurnakan jurnal ini.

Bapak Drs. Anwar, M.Si, selaku dosen pembimbing I yang telah memberi dukungan, bimbingan, saran, waktu, dan kesabaran dalam penyusunan skripsi ini;

Bapak M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP selaku dosen pembimbing II yang telah memberi dukungan, bimbingan, saran, waktu, dan kesabaran dalam pentusunan skripsi ini;

Daftar Pustaka

- [1] Moleong, Lexy,. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- [2] Narbuko, C., Acmadi, A. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [3] Pedoman Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan Jawa Timur 2010

Ucapan Terima Kasih

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

Bapak Dr. Sasongko, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

Ibu Dra. Anastasia Murdyastuti, M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;